



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG**

DENGAN

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 470/149/2022

NOMOR : 415.4/457/2022

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN REMBANG**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di **DINSOSPPKB Kabupaten Rembang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. SUPARMIN, MM
Alamat : Jalan Pemuda KM. 2,5 Rembang
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : Drs. SUBHAN
Alamat : Jalan Pemuda KM. 2 Rembang
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Rembang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Rembang;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21/HUK/2022 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2022;
8. Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/620/2017 tentang Pengangkatan Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
9. Keputusan Bupati Rembang Nomor 411.4/1188/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Rembang;
10. Keputusan Bupati Rembang Nomor 463/0970/2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang;
11. Surat Permohonan Nomor 460/1166/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 hal Permohonan BNBA DTKS Surat Keputusan Menteri Sosial 21/HUK/2022;
12. Surat Permohonan Nomor 460/1324 tanggal 17 Maret 2022 hal Permohonan BNBA PBI JKN Surat Keputusan Menteri Sosial 30/HUK/2022;

13. Berita Acara Serah Terima antara Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI dengan Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang Nomor 1176/1.7/DI.01/02/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 hal penyerahan Data BNBA DTKS Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 21/HUK/2022;
14. Berita Acara Serah Terima antara Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI dengan Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang Nomor 1908/1.7/DI_PBI.01/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 hal penyerahan Data BNBA PBI JK REMBANG berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2022;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, data anak terlantar, data lanjut usia terlantar, data disabilitas, data assesment dan psikososial anak, data perempuan pelaku usaha industri rumahan, data peserta keluarga berencana, data calon pengantin dan data pengendalian penduduk **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK, No_KK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Hubungan Keluarga, Status Kawin, Pendidikan, Pekerjaan, Alamat, RT, RW, Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Kode Pos, No Akta Lahir, No Akta Kawin, Tgl Kawin, No Akta Cerai, NIK ayah, Nama Ayah, NIK Ibu, dan Nama Ibu yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web portal*;
- b. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, No_KK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Hubungan Keluarga, Status Kawin, Pendidikan, Pekerjaan, Alamat, RT, RW, Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Kode Pos, No Akta Lahir, No Akta Kawin, Tgl Kawin, No Akta Cerai, NIK ayah, Nama Ayah, NIK Ibu, dan Nama Ibu kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;

- c. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo;
- d. Memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan data berupa data penerima bantuan sosial, data anak terlantar, data lanjut usia terlantar, data disabilitas, data assesment dan psikosial anak dan data perempuan pelaku usaha industri rumahan sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan layanan **PIHAK KEDUA** data penerima bantuan sosial, data anak terlantar, data lanjut usia terlantar, data disabilitas, data assesment dan psikosial anak, data perempuan pelaku usaha industri rumahan, data peserta keluarga berencana, data calon pengantin dan data pengendalian penduduk berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- e. Menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- f. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. Membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- h. Menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- i. Bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- j. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan data balikan berupa data penerima bantuan sosial, data anak terlantar, data lanjut usia terlantar, data disabilitas, data assesment dan psikososial anak, data perempuan pelaku usaha industri rumahan, data peserta keluarga berencana, data calon pengantin dan data pengendalian penduduk dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
 - c. Mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. Mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan No_KK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Hubungan Keluarga, Status Kawin, Pendidikan, Pekerjaan, Alamat, RT, RW, Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Kode Pos, No Akta Lahir, No Akta Kawin, Tgl Kawin, No Akta Cerai, NIK ayah, Nama Ayah, NIK Ibu, dan Nama Ibu yang dilakukan dengan mekanisme *web portal*;
 - b. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, No_KK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Hubungan Keluarga, Status Kawin, Pendidikan, Pekerjaan, Alamat, RT, RW, Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Kode Pos, No Akta Lahir, No Akta Kawin, Tgl Kawin, No Akta Cerai, NIK ayah, Nama Ayah, NIK Ibu, dan Nama Ibu dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan
 - c. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **27 April 2025** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

